



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg>

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) DI DESA TINGGAR BUNTUT KECAMATAN BANGSAL

Muhammad Diaz Handa Pratama¹, Isnaini Rodiyah*²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

diazhand7@gmail.com, isnainirodiyah@umsida.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 15 Desember 2024

Revised date: 20 Desember 2024

Accepted date: 25 Desember 2024

This research aims to determine the implementation of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) in Tinggar Buntut Village, Bangsal District. This research uses qualitative descriptive. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used by the Miles and Huberman model is through data collection, data reduction, and data presentation and drawing conclusions. The research results were reviewed from four indicators. First, Communication Indicators have not been implemented due to lack of socialization. Second, resources are not yet in line with information technology needs in implementing SIKS-NG. Third, the disposition has been said to be good because the commitment to implement SIKS-NG in Tinggar Buntut Village is already owned by the Tinggar Buntut Village Government. Fourth, the bureaucratic structure is good but there is still no written SOP regarding SIKS-NG in Tinggar Buntut Village

Keyword: Implementation, SIKS-NG, Poverty Data

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditinjau dari empat indikator. Pertama, Indikator Komunikasi belum terlaksana dikarenakan kurangnya sosialisasi. Kedua, sumberdaya belum sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi dalam implementasi SIKS-NG. Ketiga, Disposisi sudah dikatakan baik dikarenakan komitmen untuk mengimplementasikan SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut sudah dimiliki oleh Pemerintah Desa Tinggar Buntut. Keempat, Struktur Birokrasi sudah baik namun masih belum memiliki SOP secara tertulis mengenai SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut.

Kata Kunci: Implementasi, SIKS-NG, Data Kemiskinan

PENDAHULUAN

Good Governance merujuk pada prinsip tata kelola yang baik dalam sebuah negara berdasarkan pada sikap profesional dalam proses berusaha dan berkarya. *Good governance* tak jarang diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* juga didefinisikan menjadi sebuah pelaksanaan manajemen dalam pembangunan yang kokoh dan memiliki tanggung jawab yang selaras dengan konsep demokrasi yang efisien. Sebuah negara dapat dikatakan telah menerapkan *good governance* dengan baik apabila pada negara tersebut terdapat beberapa ciri dari *good governance* yakni penegakan supremasi hukum, prioritas sosial politik dan ekonomi dilandaskan pada consensus komunitas, seluruh pihak dilibatkan untuk bertanggung jawab secara transparan serta adil dan efektif, serta kepentingan dari kelompok tertinggal dan miskin selalu menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan dan perumusan kebijakan (Sulistiany 2004). Di Indonesia sendiri, *good governance* bukan merupakan sebuah istilah yang baru. Konsep ini pertama kali muncul di Indonesia setelah era reformasi yang disebabkan oleh masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemerintah orde baru. *Good governance* sudah lama menjadi mimpi yang terus diusahakan pencapaiannya oleh bangsa Indonesia. Sebab dengan *good governance* diharapkan dapat membantu proses integrasi antara peran pemerintah, sektor pemerintah dan 40ocial40kat sehingga pemerintahan di Indonesia akan lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Kamaluddin 2019). Meskipun bukan merupakan istilah baru, namun penerapan *good governance* di Ide masih menemui beberapa kendala atau permasalahan. Permasalahan tersebut adalah adanya ketidakadilan dan kurangnya efisiensi pada pelayanan publik, presentase korupsi, kolusi dan nepotisme masih cukup tinggi, banyak ditemukan penyalahgunaan dan pelanggaran wewenang oleh pejabat publik dan lain sebagainya (Sholihatn 2012). Oleh karena itu, membutuhkan adanya kerjasama, komitmen, tanggung jawab serta kesadaran dari semua pihak terkait mulai dari golongan pemerintah ataupun masyarakat agar dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa permasalahan implementasi *good governance* diatas memberikan dampak buruk bagi dunia pelayanan publik di Ide sehingga citra buruk pada pelayanan publik sudah sangat melekat di kalangan masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tentang 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut dengan SPBE adalah pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna SPBE (Pemerintah Pusat 2018). Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 disebutkan bahwa beberapa prinsip pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yakni efektivitas, efisiensi, keamanan, keterpaduan, kesinambungan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini besar harapan negara Ide untuk menghasilkan pelayanan yang transparan, mudah diakses oleh masyarakat dan efektif tanpa berbelit-belit. Praktek implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tidak dapat dipisahkan dari *E-Government*. *E-Government* didefinisikan sebagai tata cara interaksi terbaru antara pemerintah dengan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas (Irawan and Hidayat 2012). Sejak disuarakannya implementasi *E-Government*, pemerintah berlomba-lomba untuk melakukan transformasi pelayanan yang semula bersifat manual menjadi online dengan mengeluarkan sejumlah inovasi baru berupa sistem informasi dan sejumlah aplikasi (Prawira and Paraniti 2023). Terobosan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Ide saja, namun dengan hadirnya terobosan tersebut diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah yang ada di negara Ide ini, salah satunya ialah permasalahan kemiskinan.

Kemiskinan menjadi masalah yang sulit diatasi dan tak kunjung usai. Terlebih sejak kehadiran wabah covid-19, terjadi PHK secara besar-besaran sehingga jumlah pengangguran mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Penanganan Fakir Miskin maka berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, salah satunya dengan pemberian bantuan sosial (bansos) (Kemenkes RI 2011). Namun pada kenyataannya, pemerintah Indonesia belum mampu menurunkan presentase kemiskinan di Indonesia karena sering terjadi salah sasaran karena banyak data penerima program yang tidak valid. Sebagai bentuk peningkatan ketepatan sasaran bansos di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) (PERMENKES 2016) dan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Verifikasi dan Validasi DT PPFM. Dalam Permensos tersebut memutuskan bahwa verifikasi dan validasi DT PPFM dilakukan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota dan pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan data. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial membuat inovasi baru bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) merupakan sistem berbasis aplikasi yang digunakan untuk memasukkan dan memperbarui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan. Aplikasi ini dinobatkan untuk menjadi alat yang efisien dan terintegrasi dalam pengelolaan informasi kemiskinan dengan menekankan pada akurasi dan ketepatan data. Tujuannya adalah menyediakan sarana yang efektif bagi pihak terkait untuk mengumpulkan dan memperbarui data kemiskinan dengan sasaran secara tepat sampai di tingkat lokal pedesaan sehingga mendukung perencanaan dan pelaksanaan program bantuan yang menjangkau individu dan keluarga yang paling membutuhkan. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau yang kemudian disingkat menjadi SIKS-NG adalah aplikasi manajemen yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan kegunaan untuk melakukan proses pengusulan data baru dan perbaikan data terpadu sejumlah masyarakat miskin yang ada di sebuah desa. Kemensos RI memberikan bimbingan

teknis kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengenai penggunaan aplikasi SIKS-NG. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kemudian mensosialisasikan dan memberikan pelatihan bimbingan teknis kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dinas Sosial Kabupaten/Kota selanjutnya berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk melakukan pendataan dan verifikasi data penerima manfaat menggunakan aplikasi SIKS-NG. data yang terkumpul dilaporkan secara *online* dan *real-time* ke Kemensos RI melalui SIKS-NG. Sistem ini dikeluarkan pada tahun 2020 dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengintegrasikan data yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial untuk menyediakan informasi penyaluran bantuan sosial serta mendukung perencanaan program-program kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan efisien. Dalam sistem ini, ditemukan sejumlah fitur lainnya seperti perbaikan data dan pengajuan data penerima Bantuan Sosial yang baru sehingga nantinya akan menghasilkan rekapitulasi sekaligus data hasil dari perbaikan serta pengajuan data baru. Dalam pemanfaatannya, di setiap Kelurahan/Desa terdapat petugas operator. Tugas para operator di setiap Kelurahan/Desa adalah untuk melakukan proses perubahan data serta pengajuan data baru penerima bantuan sosial sehingga masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi penerima baru maupun masyarakat yang hanya akan melakukan pengecekan data secara konstan dapat mendatangi kantor Desa atau Kelurahan tempat mereka tinggal dengan membawa dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Dengan sistem ini juga tersedia informasi terkait alasan mengapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tidak lagi mendapati bantuan. Beberapa fitur yang dimiliki oleh SIKS-NG membuat sistem ini memiliki peran yang cukup penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dengan keberadaan aplikasi SIKS-NG, desa bisa dengan efektif mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis

data penting dalam menangani kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data yang berisikan informasi terkait sebuah keluarga atau individu yang membutuhkan bantuan sosial dan pemberdayaan sosial dari pemerintah. Aplikasi ini memungkinkan pihak desa untuk mengumpulkan, memperbarui, dan mengelola informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara terintegrasi dan *real-time*. Dengan data yang akurat dan terkini, desa dapat dengan mudah mengidentifikasi individu atau keluarga yang berhak menerima bantuan sosial, sehingga program-program yang dikeluarkan oleh Ide Sosial (Kemensos) terlaksana dengan lebih tepat sasaran. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Sosial memiliki sejumlah program yang bertujuan untuk meretas kemiskinan yang ada di Ide. Beberapa program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain sebagainya. Keberhasilan Ide Sosial dalam menanggapi kemiskinan tidak hanya bergantung pada beberapa program tersebut, namun juga didasarkan pada data yang akurat, yang mana data tersebut dapat dilihat melalui aplikasi SIKS-NG. Keakuratan data terkait keadaan sosial perekonomian masyarakat dapat diakses dengan mudah, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam penanganan kemiskinan dan pemberian bantuan sosial. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai sumber informasi, sehingga memungkinkan pihak desa dan pemerintah untuk melihat secara jelas siapa saja yang membutuhkan bantuan, serta kondisi yang mereka hadapi. Dengan data yang terperinci dan dapat diperbarui, SIKS-NG tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa program-program sosial yang dilaksanakan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berikut adalah tampilan dari SIKS-NG.

Gambar 1. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)



Sumber: siks.kemensos.go.id / siks.kemensos.go.id, 2024.

Salah satu desa yang menggunakan sistem tersebut ialah Desa Tinggarbuntut, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Desa Tinggar buntut telah menggunakan SIKS-NG sejak tahun 2019 untuk menangani masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Meskipun Desa Tinggarbuntut sudah sejak lama menggunakan sistem ini, bukan berarti dalam penerapannya tidak ditemui permasalahan atau kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SIKS-NG di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal ialah kurangnya fasilitas yang memadai. SIKS-NG merupakan aplikasi yang cukup berat, sehingga memerlukan perangkat komputer atau laptop yang memiliki spesifikasi yang baik untuk dapat beroperasi dengan lancar. Namun pada kenyataannya, perangkat yang tersedia di Desa Tinggarbuntut sering kali tidak memenuhi syarat untuk menjalankan SIKS-NG secara optimal dan maksimal. Selain itu, kinerja operator yang mengelola sistem SIKS-NG juga menjadi perhatian. Banyak operator yang belum memiliki kecepatan dan ketepatan dalam mengoperasikan sistem, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan operator yang tidak memiliki latarbelakang yang tepat dengan tupoksi yang dikerjakan. Sehingga hal itu berdampak pada keterlambatan pada saat pengelolaan data dan tidak efisien. Disamping itu, belum semua penduduk miskin yang terdata telah diinput ke dalam SIKS-NG. Terdapat juga kesalahan dalam penginputan data, seperti nama dan asal Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang jelas antara operator dan calon KPM. Komunikasi yang

tidak efektif ini dapat mengakibatkan kesalahan informasi yang berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dari tantangan ini, data mengenai data penerima bantuan di Desa Tinggarbuntut sebagai berikut:

Tabel 1. Data Usulan Penerima Bantuan

| Jenis Bantuan Sosial | Jumlah Usulan Pada SIKS-NG | Jumlah Tervalidasi |
|----------------------|----------------------------|--------------------|
| PBI | 737 | 701 |
| Sembako | 840 | 791 |
| PKH | 982 | 940 |

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya selisih antara alokasi dan realisasi bantuan di Desa Tinggarbuntut yang disebabkan oleh ketidaksesuaian data yang diajukan dengan kriteria validasi yang ditentukan. Disisi lain juga disebabkan oleh sosialisasi yang kurang dari pemerintah Desa Tinggar Buntut. Kendala selanjutnya yakni sumber daya pengelola SIKS-NG yang masih terbatas, terutama karena proses pemutakhiran data memerlukan pembaruan secara berkala, yang membutuhkan waktu serta sumber daya yang memadai. Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan teori implementasi yang disampaikan George Edward III. Implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan sebuah rencana yang telah tersusun secara spesifik dan dalam penerapan sebuah rencana tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada teori implementasi oleh George Edward iii ini mendapati indikator yakni mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi sampai dengan struktur birokrasi.

Beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan penulis ialah penelitian berjudul “Penerapan Aplikasi Siks-Ng Dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan” Penelitian ini memperoleh hasil bahwasanya dalam penerapan aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan ditemukan beberapa permasalahan sehingga perbaikan sangat diperlukan, salah satu saran yang dikemukakan penulis ialah diperlukan kordinasi yang baik oleh pihak pelaksana

dan stake holder yang terlibat sehingga data yang dihasilkan cukup valid (Hutagalung et al. 2024). Penelitian selanjutnya ialah “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS” hasil dari penelitian ini adalah aplikasi SIKS-NG ini memberikan sejumlah dampak positif pada masyarakat yang dijadikan sasaran seperti dapat meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat (ramadan ergi and 2024 2024). Selanjutnya penelitian dengan judul “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan” dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa manfaat SIKS-NG sudah dirasakan dan dapat mempermudah masyarakat setempat untuk memperoleh informasi terkait bantuan sosial, meskipun demikian kekurangan dari penerapan SIKS-NG ini juga ditemukan kendala tertentu khususnya sumber daya finansial yang belum mencukupi serta kurangnya tenaga ahli pada bidang informasi teknologi (Andriani, Suwitri, and Yuniningsih 2023). Kemudian penelitian dengan judul “Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba” hasil dari penelitian ini ialah implementasi dari aplikasi menghasilkan data yang selaras dengan keadaan di lapangan (Purwanti 2023).

Berlandaskan pada refrensi penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan berfokus pada Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal yang merupakan satu dari banyak desa yang menggunakan SIKS-NG sebagai sistem informasi untuk pendataan bagi warga masyarakat mereka. Jika dikaitkan berdasarkan masalah yang telah ditemukan penulis maka penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan terkait bagaimana Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Mojokerto” termasuk pada model deskriptif yang menggunakan jenis kualitatif. Kualitatif merupakan suatu metode penelitian dengan menggunakan data bersifat deskriptif secara lisan maupun tertulis yang dihasilkan melalui informan sebagai pelaku yang dituju dan diwawancarai. Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwasanya metode kualitatif yakni sebuah metode yang diterapkan untuk menyelidiki, menggambarkan dan menemukan sebuah objek yang sedang diteliti dan digunakan untuk menjabarkan atau menjelaskan keistimewaan dari pengaruh dunia sosial yang kemudian dijabarkan dan dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode kuantitatif (Feny Rita Fiantika et all 2022). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis dan menjelaskan secara rinci implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Definisi dari teknik pengumpulan data adalah metode yang diterapkan dengan tujuan memperoleh data yang akan diteliti, pada teknik pengumpulan data ini diperlukan upaya yang strategis dan efisien agar data yang sesuai dan selaras dengan apapun yang sesungguhnya terjadi dilapangan dapat dengan mudah didapatkan (Setyawan 2013). Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendukung penelitian dengan data primer melalui wawancara kepada Suji Handoko, Kepala Desa Tinggar Buntut, dan Nurul Yakin, Operator SIKS-NG. Data sekunder diperoleh dari dokumen lapangan, jurnal ilmiah, dan arsip online. Penelitian ini berfokus pada implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut, menggunakan indikator George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Di samping itu, dalam menentukan informan pada penelitian yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Mojokerto didasarkan pada *purposive sampling* yang menjadi teknik penentuan informan dengan karakteristik dari sampel yang dipakai dan dinilai selaras dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan (Sirajuddin Saleh 2017). Analisis data dalam penelitian ini mengikuti metode Miles dan Huberman, meliputi reduksi data yaitu memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan, penyajian data yaitu mengorganisir informasi untuk memudahkan pemahaman, dan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, peneliti berhasil mendapatkan hasil pembahasan dari penelitian Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi. Dalam proses ini, seseorang (komunikator) mengirimkan pesan kepada orang lain (komunikan) dengan tujuan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, atau data. Komunikasi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Informasi kebijakan publik harus disampaikan secara jelas kepada para pelaksana kebijakan. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan [17]. Pada komunikasi internal staf Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. Dalam pelaksanaannya, terdapat pembagian tugas yang spesifik. Namun, pengelolaan aplikasi SIKS-NG

dilakukan oleh satu orang administrator. dimana staff tersebut memiliki tugas yaitu memberikan update data melalui aplikasi SIKS-NG sehingga data yang masuk pada aplikasi tersebut sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“memang untuk tenaga teknis yang mengelola aplikasi SIKS-NG ini sudah ada pembagiannya. Kami di sini sepakat untuk menunjuk satu staff guna pengelolannya yang tujuannya agar dapat focus mengupdate data pada aplikasi SIKS-NG tersebut. Solanya inikan berhubungan dengan bantuan yang memang harus diberikan kepada warga yang memang kondisi ekonominya kurang di desa sini. Jadi kami tidak mau mengambil resiko jika bantuan tersebut tidak diberikan sesuai dengan peruntukannya.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nurul Yakin selaku Operator Aplikasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“memang saya mendapat tugas dari Pak Kades untuk menjadi operator SIKS-NG. Mulai dari sosialisasi, update data, sampai nanti proses pengajuan, serta pelaporan saya yang menangani. Sebenarnya pekerjaannya bukan hanya SIKS-NG aja, banyak juga lainnya. Namun, SIKS-NG ini yang diprioritaskan. Jadi apapun yang berkaitan dengan SIKS-NG saya yang melaksanakan.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Sedangkan Untuk komunikasi eksternal, yaitu antara admin dan masyarakat, Desa Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal, melaksanakan sosialisasi dengan mengundang seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah tersebut. Undangan disampaikan melalui selebaran surat untuk menghadiri pertemuan di Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal. Sosialisasi program merupakan tahap awal yang penting untuk menjamin keberhasilan program dalam mencapai sarannya. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilaksanakan secara terstruktur dan terencana, dengan memanfaatkan sumber daya organisasi secara maksimal agar tujuan

yang direncanakan dapat tercapai secara optimal. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“pada awal adanya aplikasi SIKS-NG ini ada, kami melakukan sosialisasi dan mengundang seluruh RT, RW, Kasun se Desa Tinggar Buntut. Tujuannya agar pemerintah desa yang paling terkecil dan paling dekat dengan masyarakat ini mengetahui bahwa saat ini telah ada aplikasi yang digunakan untuk pengajuan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Kami juga memberikan informasi bahwa aplikasi ini bertujuan agar bantuan langsung bisa diambil melalui ATM penerima manfaat dan tidak melalui desa.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal telah melakukan sosialisasi dengan RT, RW, dan Kasun dilingkungan Desa dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai aplikasi SIKS-NG untuk program bantuan sosial yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan sosialisasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal



Sumber : Pemerintah Desa Tinggarbuntut, 2024

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa sosialisasi SIKS-NG telah dilakukan di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. Namun sosialisasi tersebut hanya dilakukan sekali saja sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“di Desa Tinggar Buntut ini dilakukan sosialisasinya hanya satu kali saja. Sosialisasi dilakukan paada awal aplikasi SIKS-NG ini ada. Selanjutnya berjalan sesuai dengan mekanisme, jika ada perubahan atau pembaharuan

mengenai SIKS-NG juga kami tidak melakukan sosialisasi lagi.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Kegiatan sosialisasi dilakukan hanya satu kali dan jika ada pembaharuan aplikasi SIKS-NG pemerintahan Desa Tinggar Buntut tidak melakukan sosialisasi ulang. Kondisi tersebut membuat perangkat desa yang terkecil yaitu RT, RW, dan Kasun tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai perubahan atau pembaharuan yang ada pada aplikasi SIKS-NG tersebut sehingga didapati berbagai ketidak sesuaian informasi yang didapat oleh pihak RT, RW, dan Kasun. Sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“memang saya juga memahami sosialisasi yang kami lakukan kurang, dikarenakan jika ada pembaharuan dari SIKS-NG ini kami tidak sosialisasikan lagi. Tersu juga mengenai hasil validasi yang tidak sesuai dengan pengajuan kami juga kami tidak sampaikan kepada pengusung. Jadi kadang juga ada missskomunikasi. Tapi, memang kami juga terkendala waktu dan biaya juga. Validasi melalui SIKS-NG juga membutuhkan waktu maksimal tiga bulan dari pengajuan ke pusat..” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara dan data diatas dapat diketahui terkait indikator komunikasi Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal belum baik dikarenakan Pemerintah Desa Tinggar Buntut hanya melakukan sosialisasi kepada stake holder terkait SIKS-NG hanya dilakukan sekali, sehingga saat ada pembaharuan di SIKS-NG tidak dilakukan sosialisasi Kembali. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perselisihan antara pengusung dan pihak pemerintah Desa Tinggar Buntut. Hasil yang dijumpai penulis sama dengan penelitian terdahulu berjudul “Penerapan Aplikasi SIKS-NG Dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di Kelurahan Majasari masih belum memiliki data yang valid dikarenakan kurangnya kordinasi yang baik oleh pihak pelaksana dan stake holder yang terlibat.

Sumber Daya

Ketersediaan dan kualitas sumber daya menjadi penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia maupun fasilitas, sangat

krusial dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan kebijakan. Kekurangan atau ketidaksesuaian sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang optimal perlu dilakukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.

Edward III (1980) menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti keuangan, manusia, dan peralatan, merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan sulit mencapai tujuannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat. Kekurangan atau ketidaksesuaian kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kapasitas yang memadai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Jika kita tinjau kondisi di lapangan, seperti di Desa Tinggar Buntut, sumber daya manusia tidak menjadi kendala yang nyata. Jumlah perangkat desa yang sudah sesuai dengan beban kerja. Berikut merupakan data jumlah pegawai pemerintahan Desa Tinggar Buntut sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai Pemerintah Desa Tinggar Buntut

| Jabatan | Jenis Kelamin | Jumlah |
|--------------------------|---------------|--------|
| Kepala Desa | L | 1 |
| Sekretaris Desa | L | 1 |
| Kaur Tata Usaha dan Umum | L | 1 |
| Kaur Keuangan | L | 1 |
| Kasi Pemerintahan | L | 1 |
| Kasi Kesejahteraan | L | 1 |
| Kasi Pelayanan | P | 1 |
| Staff Perangkat Desa | L | 1 |
| Total | | 8 |

Sumber : Diolah Peneliti (2024)

Berdasar tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah perangkat Desa Tinggar Buntut jumlahnya

delapan orang dan satu orang merupakan staff. Sebagaimana yang disampaikan saat penulis melakukan penelitian, staff tersebut merupakan perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa guna mengoperasikan Aplikasi SIKS-NG. Untuk meoperasikan aplikasi SIKS-NG diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. di Pemerintahan Desa Tinggar Buntut belum didukung oleh operator yang memiliki kemampuan pengelolaan teknologi informasi. Sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG ini memang saya menunjuk perangkat Desa yang memiliki kemampuan dibidang IT yang lebih dibandingkan lainnya, tujuannya agar Desa kami tidak tertinggal atau tidak memahami bagaimana aplikasi SIKS-NG ini. kalau dibandingkan dengan yang lain mungkin kemampuannya masih dibawahnya dikarenakan memang latar belakang pendidikannya juga hanya SMA. Tapi kalau dilingkungan pemdes sini cukup lah. Terlepas juga kita dijemptani dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinsos atau pemerintah daerah juga dengan bimtek-bimteknya. Kalau saya tidak menunjuk perangkat desa yang mahir IT juga tidak ada fungsinya. Memang untuk Pendidikan formal staff yang saya pilih ini masih SMA saja, memang masih membutuhkan untuk emningkatkan Pendidikan formalnya saya rasa begitu.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa di Desa Tinggar Buntut memiliki operator aplikasi SIKS-NG yang memiliki kemampuan bidang teknologi informasi yang belum cukup mumpuni dan masih memiliki latar belakang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) jika dibandingkan dengan staff yang ada di Pemerintahan Desa lainnya. Selain sumber daya manusia yang mumpuni juga perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Fasilitas yang baik tidak hanya mendukung tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga berperan penting dalam memfasilitasi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sehari-hari. Infrastruktur yang memadai akan menjadi fondasi yang kuat bagi organisasi dalam menjalankan operasionalnya secara efektif dan

efisien. Sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“saya rasa tidak hanya sumber daya manusia saja yang harus terpenuhi kemampuannya, kami juga berusaha memberikan fasilitas yang menunjang untuk mengimplementasikan Aplikasi SIKS-NG ini dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Memang saya akui untuk fasilitas seperti computer atau laptop sejak awal sudah kami sediakan, namun awal adanya aplikasi ini kekurangan dikami yaitu jaringan internet yang kurang baik. Bisa dikatakan lemotlah, kemudian kami tahu bahwa kebutuhan internet saat ini memang sangat dibutuhkan sehingga hal tersebut segera diperbaiki. Hingga saat ini alhamdulillah jaringan internet di wilayah kantor desa ini sudah baik dan dapat mendukung kinerja kita.” (Wawancara, 03 Desember 2024))

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nurul Yakin Selaku Operator Aplikasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“awal-awal dulu jaringan internet memang menjadi hambatan kita untuk mengakses atau melakukan kegiatan yang bersifat online. Untungnya pak kepala desa mau menerima masukan kami sehingga dilakukan perbaikan jaringan internet yang memadai guna menunjang kinerja kita. Hingga saat ini fasilitas yang diberikan saya rasa sudah cukup menunjang baik dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG ini.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal telah memiliki sarana dan prasarana yang sudah mendukung kebutuhan pengoperasian aplikasi SIKS-NG Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal. Berikut merupakan data sarana dan prasarana Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal yang mendukung dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG sebagai berikut :

Tabel 2. Data Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal

| No. | Jenis Fasilitas | Jumlah | Kondisi |
|-----|-----------------|--------|---------|
| 1 | Komputer | 2 | Baik |
| 2 | Laptop | 4 | Baik |
| 3 | Printer | 2 | Baik |
| 4 | HP | 2 | Baik |
| 5 | LCD | 1 | Baik |

Sumber : Diolah Peneliti, (2024)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang diberikan oleh Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sudah dapat dikatakan baik dan dapat menunjang pengoperasian aplikasi SIKS-NG. Sumber daya lainnya yaitu berupa anggaran, dimana di Desa Tinggar Buntut tidak memiliki alokasi dana khusus untuk implementasi SIKS-NG sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“untuk alokasi dana khusus untuk Implementasi SIKS-NG ini memang di Desa Tinggar Buntut tidak ada. Jadi ya kita penuhi aja kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan. Jadi memang ga ada yang dikhususkan.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Hasil penelitian berdasarkan wawancara terkait indikator sumber daya sudah dapat dikatakan belum terpenuhi. Dimana pada sumber daya manusia belum dapat mengoperasikan aplikasi SIKS-NG sesuai dengan kebutuhan dikarenakan kemampuan teknologi informasi yang kurang mumpuni. Sedangkan pada sumber daya sarana dan prasarana juga sudah dapat terpenuhi dimana sarana dan prasarana yang menunjang pada pengoperasian aplikasi SIKS-NG tersebut telah disediakan oleh Pemerintah Desa Tinggar Buntut. Serta dalam sumber daya anggaran Pemerintah Desa Tinggar Buntut tidak memiliki alokasi dana khusus untuk implementasi SIKS-NG. Hasil yang didapatkan oleh penulis saat ini sama dengan penelitian dengan judul “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS” dimana pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu sama-sama telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengoperasian aplikasi SIKS-NG.

Disposisi

Menurut Edward III, disposisi dalam konteks implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai komitmen atau kemauan kuat dari para pelaksana untuk benar-benar mewujudkan tujuan suatu kebijakan. Dengan kata lain, disposisi mencerminkan sejauh mana para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki keinginan yang tulus untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemilihan dan penempatan pegawai dalam suatu jabatan sangat krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Jika para pegawai tidak memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka akan muncul berbagai kendala dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih pegawai yang tidak hanya memiliki kompetensi yang sesuai, tetapi juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“dalam pengangkatan perangkat desa ini memang berada di ranah saya. Dalam pengangkatan perangkat desa baru saya dan perangkat desa serta BPD sepakat untuk memberikan kebijakan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar. Namun, dalam kesepakatan itu tidak terlepas dari dasar hukum yang kami acu yaitu UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2. Salah satu isinya yaitu Kepala Desa

berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam rekrutmen perangkat desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tinggar Buntut dilaksanakan berdasar UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga, Proses pengangkatan pegawai dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan calon pegawai yang tidak hanya memiliki kompetensi yang dibutuhkan, tetapi juga memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan organisasi. Selain rekrutmen perangkat desa, Insentif merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program. Insentif dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memotivasi seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks implementasi program, insentif dapat berupa materi (uang, bonus, promosi) maupun non-materi (pengakuan, penghargaan, peluang pengembangan diri). Sebagaimana disampaikan oleh Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“untuk insentif yang kami berikan kepada staff yang mengoperasikan SIKS-NG ini memang bukan dalam bentuk materi atau uang jasa. Dikarenakan memang setiap bulannya staff tersebut mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan di desa kami. Untuk insentif yang kami berikan berupa pengembangan seperti mengikuti staff tersebut dalam kegiatan-kegiatan diklat yang dilakukan program SIKS-NG. kami juga ada niatan untuk memberikan bantuan untuk melanjutkan Pendidikan setingkat S1. Sehingga kami harap kemampuan tentang TInya makin berkembang.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah Desa Tinggar Buntut yaitu mengikuti Operator SIKS-NG dalam segala kegiatan diklat yang berkaitan dengan SIKS-NG serta pemerintah Desa Tinggar Buntut kedepannya hendak memberikan beasiswa pengembangan kompetensi Operator SIKS-NG. Dapat diketahui bahwa latar belakang Pendidikan formal yang dimiliki oleh operator SIKS-

Ng tersebut yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, kendati demikian operator SIKS-NG tersebut telah mampu dan mengetahui tugas dan fungsinya dalam pengoperasian SIKS-NG Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suji Handoko, Kepala Desa Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal, berikut ini:

“meskipun dia lulusan SMA tetapi dia sangat memahami apa tugas dan fungsinya sebagai operator SIKS-NG. dari mulai update data, cek semua validasi yang dari pusat, pengajuan nama penerima manfaat, hingga mengajukan pemberhentian bantuan dikarenakan suatu dan lain hal. Semua bisa di lakukan oleh operator SIKS-NG tersebut dengan baik sepengetahuan saya.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara dapat dijumpai hasil pada indikator disposisi pada penelitian telah sesuai dengan indikator disposisi sebagaimana disampaikan oleh Edward III. Dimana dalam melakukan rekrutmen perangkat Desa Tinggar Buntut dilaksanakan berdasar UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga, Proses pengangkatan pegawai dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam insentif yang diberikan oleh pemerintah Desa Tinggar Buntut yaitu mengikuti Operator SIKS-NG dalam segala kegiatan diklat yang berkaitan dengan SIKS-NG serta pemerintah Desa Tinggar Buntut kedepannya hendak memberikan beasiswa pengembangan kompetensi Operator SIKS-NG. Serta operator SIKS-NG ini telah mengetahui tugas dan fungsinya sebagai operator SIKS-NG.

Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia, dan para pelaksana memahami serta memiliki niat untuk menjalankannya, kebijakan tersebut mungkin tetap gagal diimplementasikan karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Menurut Edward III, dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah penerapan prosedur operasional standar dan penguatan struktur birokrasi dalam pelaksanaan SIKS-NG. Keberadaan

SOP diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, menyerragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas sehingga akan menimbulkan fleksibilitas yang besar serta agar terjadinya suatu kesamaan dalam penerapan peraturan-peraturan. Penyebaran tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara berberrapa unit organisasi diserburt dengan fragmerntasi. Dimensi fragmerntasi menurut Widodo (2013) menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmerntasi dapat merningkatkan gagalnya komunikasi karena akan mermbatasi kemampuan para pejabat tinggi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan akibat lebih lanjut dapat mernimbulkan terjadinya ketidakefisienan serta pemborosan sumber daya yang langka.

Standard Operational Procedure, SOP merupakan perkembangan dari turnturan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyerragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan lurus agar proses birokrasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Di Pemerintahan Desa Tinggar Buntut belum memiliki SOP terkait SIKS-NG sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suji Handoko selaku Kepala Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“untuk SOP sendiri kami memang belum ada, untuk Langkah-langkah yang dilakukan itu memang disesuaikan dengan hasil mengikuti bimtek. Kemudian sama operator yang mengikuti itu di infokan kepada kami sehingga semuanya sudah tahu bagaimana langkah pengajuan bantuan melalui SIKS-NG. Kemudian persyaratan juga diinfokan saja secara lisan. Kami memang belum membuat secara tertulis SOPnya, Insyaallah kedepannya kami akan membuat SOP secara tertulis agar warga juga dapat mengetahui dan memahami bagaimana langkah atau prosedur dalam pengusulan bantuan melalui SIKS-NG itu sendiri. Memang keberadaan SOP dapat membuat kami yang terlibat pada implementasi SIKS-NG ini menjadi lebih konsisten dan akuntabilitas kami lebih baik lagi.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Nurul Yakin, selaku Operator Aplikasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal, yang menyampaikan hal berikut:

“memang untuk SOP secara tertulis di Desa ini belum ada, kami memberikan langkah-langkah itu secara oral jadi dari mulut ke mulut. Memang itu kurang efektif dikarenakan masing-masing orang nantinya beda-beda pengertian dan nantinya ketika mau di ajukan ada saja yang perlu diperbaiki lagi. Untuk kedepannya kami akan membuat SOP secara tertulis untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui prosedur yang ada di SIKS-NG.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa di Pemerintah Desa Tinggar Buntut belum memiliki SOP terkait SIKS-NG. Namun, kedepannya Pemerintah Desa Tinggar Buntut akan membuat SOP terkait SIKS-NG agar masyarakat mengetahui secara jelas mengenai prosedur yang berkaitan dengan SIKS-NG. Selain SOP, Fragmentasi juga diperlukan pada proses implementasi SIKS-NG, Fragmentasi merupakan ciri kerdura yang termasuk dalam variabel struktur birokrasi. Fragmentasi juga mernperngaruhi implementasi kebijakan. Fragmentasi adalah permbagian tanggung jawab surat kerbijakan diantara berrbagai erntitas yang berrberda, yang mermerrlurkan koordinasi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nurul Yakin selaku Operator Aplikasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sebagai berikut:

“untuk system memang sudah terintegrasi secara baik dan langsung berkaitan dengan kemensos. Untuk validasi juga tidak ada kaitannya dengan dinsos kabupaten melaikan langsung dari kemensos yang memvalidasi pengajuan kami ini. Kemudian untuk bantuan juga langsung masuk kepada rekening warga masing-masing hanya saja kami menginfokan waktu pencainanya saja kepada warga. Sehingga kami tidak ada kaitannya untuk pengambilan bantuan secara manual ke desa. Untuk data juga sdh terintegrasi langsung dengan data kemiskinan yang dimiliki dinas sosial kabupaten.” (Wawancara, 03 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas tidak terdapat fragmentasi dalam implementasi SIKS-NG sehingga semakin sedikit fragmentasi dalam implementasi SIKS-NG artinya implementasi akan berjalan dengan baik. Dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa dalam indikator struktur birokrasi pada implementasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut belum memiliki SOP secara tertulis dan tidak terdapat banyak fragmentasi pada implementasi SIKS-NG sehingga konsistensi data sesuai dengan data pusat. Temuan ini juga disandingkan dengan penelitian terdahulu berjudul “Penerapan Aplikasi SIKS-NG Dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan” dijumpai hasil yang berbeda dimana data kemiskinan di Kelurahan Majasari belum memiliki data yang valid dikarenakan kurangnya koordinasi antara stakeholder yang terkait. Kurangnya koordinasi tersebut membuat perbedaan interpretasi terhadap kebijakan dan prosedur, serta tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal sudah dapat dikatakan baik namun masih terdapat kekurangan sebagai berikut :

Pertama, komunikasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tinggar Buntut belum baik dikarenakan Pemerintah Desa Tinggar Buntut hanya melakukan sosialisasi kepada stake holder terkait SIKS-NG hanya dilakukan sekali, sehingga saat ada pembaharuan di SIKS-NG tidak dilakukan sosialisasi kembali.

Kedua, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya sudah dapat dikatakan belum terpenuhi. Dimana pada sumber daya manusia belum dapat mengoperasikan aplikasi SIKS-NG sesuai dengan kebutuhan dikarenakan kemampuan teknologi informasi yang kurang mempunyai. Sedangkan pada sumber daya sarana dan prasarana juga sudah dapat terpenuhi dimana sarana dan prasarana yang

menunjang pada pengoperasian aplikasi SIKS-NG tersebut telah disediakan oleh Pemerintah Desa Tinggar Buntut. Serta dalam sumber daya anggaran Pemerintah Desa Tinggar Buntut tidak memiliki alokasi dana khusus untuk implementasi SIKS-NG.

Ketiga, disposisi dapat disimpulkan bahwa Disposisi telah sesuai. Dimana Proses pengangkatan pegawai dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam insentif yang diberikan oleh pemerintah Desa Tinggar Buntut yaitu mengikuti Operator SIKS-NG dalam segala kegiatan diklat yang berkaitan dengan SIKS-NG serta pemerintah Desa Tinggar Buntut kedepannya hendak memberikan beasiswa pengembangan kompetensi Operator SIKS-NG. Serta operator SIKS-NG ini telah menegetahui tugas dan fungsinya sebagai operator SIKS-NG.

Keempat, Struktur Birokrasi implementasi SIKS-NG di Desa Tinggar Buntut belum memiliki SOP secara tertulis dan tidak terdapat banyak fragmentasi pada implementasi SIKS-NG sehingga konsistensi data sesuai dengan data pusat.

REFERENSI

- Andriani, Yevi, Sri Suwitri, and Tri Yuniningsih. 2023. ‘Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan’. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 11(2):129–47. doi: 10.34010/agregasi.v11i2.11255.
- Feny Rita Fiantika et all. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Hutagalung, Aini, Eva Mailsari, Niken Rahmanti, and Lubi Nugraha. 2024. ‘Penerapan Aplikasi Siks-Ng Dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dikelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan’. 17(1):83–87.
- Irawan, Bambang, and Muhammad Nizar Hidayat. 2012. *E-Governmnet, Konsep, Esensi, Dan Studi Kasus*.
- Kamaluddin, Santrio. 2019. ‘Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang’. *Papua* 51

Review: *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan* 3(1):222–28.

Kemenkes RI. 2011. ‘No Title’. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 16(2):39–55.

Pemerintah Pusat. 2018. ‘Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik’. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* 110.

PERMENKES 2016. 2016. ‘No Title’. (August).

Prawira, Mahakrisna Giri, and Anak Agung Sagung Poetri Paraniti. 2023. ‘Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan’. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6(1):82–89. doi: 10.47532/jirk.v6i1.828.

Purwanti, Eka Henny. 2023. ‘Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG Di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba’. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies* 4(1):91–103. doi: 10.33822/jpds.v4i1.6580.